

PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI DI INDONESIA

Yogi Yahya Butar-Butar *
Dr. Tajuddin Noor, SH.M.Hum. Sp.N **
Dr. Cut Nurita, SH.,M.H **

ABSTRAK

Kepolisian berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, namun wewenang ini dibagi dengan KPK dan Kejaksaan. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan penegakan hukum tindak pidana korupsi di wilayah hukum kepolisian Ressor Serdang Bedagai, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Serdang Bedagai, bagaimana hambatan dan uaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Serdang Bedagai.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dan didukung dengan data yuridis empiris yaitu melakukan wawancara dengan Ipda Cardio S Butarbutar selaku Kanit Tipikor Polres Serdang Bedagai Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Serdang Bedagai i adalah melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang tidak memenuhi syarat untuk disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi hanya dapat melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan aparatur negara dan mengakibatkan kerugian keuangan negara minimal Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), untuk itu dibutuhkan peran jaksa sebagai penyidik perkara tindak pidana korupsi yang tidak memenuhi syarat untuk disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Serdang Bedagai adalah keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sinergi dengan lembaga lain, serta adanya potensi benturan kewenangan dengan KPK. Upaya mengatasi kendala tersebut meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat koordinasi dengan lembaga lain, dan memastikan implementasi hukum yang konsisten.

Kata Kunci: Kepolisian, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi

*Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**Dosen Pembimbing I Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**Dosen Pembimbing II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**THE ROLE OF THE POLICE IN LAW ENFORCEMENT AGAINST
PERPETRATORS OF CORRUPTION CRIMINAL ACTS IN THE
JURISDICTION OF INDONESIA**

Yogi Yahya Butar-Butar *
Dr. Tajuddin Noor, SH.M.Hum. Sp.N **
Dr. Cut Nurita, SH., M.H **

ABSTRACT

The police have the authority to investigate corruption crimes, but this authority is shared with the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Prosecutor's Office. The problem in this thesis is how the law enforcement of corruption crimes is regulated within the jurisdiction of the Serdang Bedagai Police Resort, how the law is enforced against perpetrators of corruption crimes occurring within the jurisdiction of the Serdang Bedagai Police Resort, and what obstacles and efforts are made to law enforcement against perpetrators of corruption crimes occurring within the jurisdiction of the Serdang Bedagai Police Resort.

This research is normative and supported by empirical legal data, including interviews with First Inspector Cardio S. Butarbutar, Head of the Corruption Crimes Unit of the Serdang Bedagai Police Resort. The data analysis used is qualitative.

Law enforcement against perpetrators of corruption crimes occurring within the jurisdiction of the Serdang Bedagai Police Resort involves investigating corruption cases that do not meet the requirements for investigation by the Corruption Eradication Commission. The Corruption Eradication Commission (KPK) can only investigate corruption cases involving state officials and resulting in state financial losses of at least IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). Therefore, the role of prosecutors as investigators of corruption cases that do not meet the requirements for investigation by the KPK is required.

Research findings indicate that obstacles to law enforcement against perpetrators of corruption within the jurisdiction of the Serdang Bedagai Police Department include limited human resources, lack of synergy with other institutions, and potential conflicts of authority with the Corruption Eradication Commission (KPK). Efforts to address these obstacles include increasing human resource capacity, strengthening coordination with other institutions, and ensuring consistent legal implementation.

Keywords: Police, Law Enforcement, Corruption

**Student of Law Program, Islamic University of North Sumatra.*

***Supervisor I of Law Program, Islamic University of North Sumatra*

***Supervisor II of Law Program, Islamic University of North Sumatra*